

## DAFTAR PUSTAKA

- Bergmann, J. R. (1990). *The Dynamics of Dialogue*. (I. Markova & K. Foppa, Eds.). Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, pp. 201-26.
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010). EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Eisenhardt. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management*, 14(4), 532. <http://doi.org/10.2307/258557>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Handayani, D. (2012). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 5(12), 12–16. <http://doi.org/10.1108/03068290910996981>
- Hasthoro, H.A., & Suhardjanto, D. (2014). Karakteristik Pemerintah Daerah, Korupsi dan Kinerja Keuangan Daerah. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IAI Kompartmen Akuntan Pendidik*.
- Januarti, I. (2009). Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan , Kualitas Auditor , Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern ( Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ). *Jurnal Universitas Diponegoro*, 1–26.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior,

- agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm*, 3(4), 283–303. <http://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1–17.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Moe, T. M. (2010). The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4), 739–777.
- Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007, 2004(32).
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, 6, 1–9.
- Pramono, J. (2011). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta), 83–112.
- Retaduari, E.A. (2017). *Detiknews*, *BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi*. Diakses 20 Juni 2018, dari detikcom: <https://m.detik.com/news/d-3513210/bpk-opini-wtp-bukan-jaminan-tak-ada-korupsi>
- Sakinatantri (2012). *Pemerintah Abdi atau Agen?* Diakses 20 Juni 2018, dari <http://www.google.co.id/amp/s/sakinatantri.wordpress.com/2012/10/17/peme>

rintah-andi-atau-agen/amp

Scott, A. J. (1997). The Cultural Economy of Cities. *International Journal of Urban and Regional Research*, 21(2), 323–339. <http://doi.org/10.1111/1468-2427.00075>

Setiawan, W., & Muid, D. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Pemerintah Daerah di Indonesia.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (24), 1381–1393.

Suryana, D. (2016). *Rimanews: Inilah Nama 17 Gubernur yang Terlibat Korupsi*. Diakses 20 Juni 2018, dari <https://archive.rimanews.com/nasional/hukum>

Taher, A.P. (2018). *tirto.id: Kepala Daerah Peraih WTP yang Terlibat Korupsi*. Diakses 20 Juni 2018, dari <https://amp.tirto.id/kepala-daerah-peraih-wtp-yang-terjerat-korupsi>

Tjandra, W.R. (2017). *KOMPAS: Menelisik Akar Korupsi di Daerah*. Diakses 20 Juni 2018, dari <https://nasional.kompas.com/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta

Virgasari, A. (2009). Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah. *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.*

Wahyudin, A., & Solikhah, B. (2017). Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 17(2), 250–265. <http://doi.org/10.1108/CG-02-2016-0034>

Wicaksono, A. (2018). *CNN Nasional: Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Sebut Perlu Kontrol Warga*. Diakses 20 Juni 2018, dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180227000808-12-279017/marak-ott-kepala-daerah-mendagri-sebut-perlu-kontrol-warga>